



**ASOSIASI PROGRAM STUDI
HUKUM TATANEGARA (*SIYASAH SYAR'IYYAH*) INDONESIA
(APHUTARI)**

PAKTA KOMITMEN BERSAMA

No : B-005/VII/IAPHUTARI/2023

TENTANG

**RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DAN
PETA MATA KULIAH PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH SYAR'IYYAH*)
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI (PTKN)**

BENGKULU, 8 – 10 JULI 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan dibawah ini, kami Anggota Asosiasi Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Indonesia (APHUTARI) dengan ini menyatakan komitmen bersama terhadap hasil pembahasan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Peta Mata Kuliah Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) PTKN yang telah dibahas pada hari Senin – Rabu, tanggal 8 – 10 Juli 2023, bertempat di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menyatakan persetujuan bahwa:

A. PROFIL LULUSAN PRODI HTN

NO	PROFIL LULUSAN (PL)	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN	PROFESI
PL1	Praktisi Hukum	Profesi praktisi hukum berkaitan dengan pengadilan maupun di luar pengadilan. Praktisi Hukum meliputi Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi, konsultan hukum, paralegal, mediator, sipir di Lapas/Bapas dan TNI. Kompetensi praktisi hukum merupakan profil lulusan utama prodi HTN. Tugas utama praktisi hukum adalah menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum. Praktisi hukum yang sebagai sebagai pejabat negara memiliki wewenang kekuasaan yang signifikan dalam lembaga peradilan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakterpikahakan, dan juga penyalahgunaan wewenang.	- Hakim - Panitera - Jaksa - Polri - TNI - Advokat - Paralegal - Konsultan Hukum - Mediator - Sisir LP Kemenkumham
PL2	Legal Drafter/ Perancang Perundang-	Legal Drafter dapat dikatakan sebagai salah satu profesi hukum yang belum terlalu terkenal tetapi menjanjikan, karena profesi legal drafter dapat ditemui di berbagai instansi pemerintah atau di legislatif, misalnya pada	

NO	PROFIL LULUSAN (PL)	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN	PROFESI
	undangan	Biro Hukum di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, DPR atau DPRD, Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait di bawahnya, dan lain sebagainya.	
PL3	Analisis Hukum	Ahli hukum yang mampu mengembangkan hukum untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Profesional di bidang hukum yang dapat bekerja mandiri atau berkolaborasi dengan profesional bidang lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum. Individu yang bertanggung jawab untuk mengembangkan segala kemampuan dirinya dan khususnya kemampuannya di bidang analisis kasus hukum dan mengaudit dokumen-dokumen hukum. Kompetensi analisis hukum meliputi Analisis Perkara, Analisis Putusan, dan Analisis Pertimbangan Hukum yang diadakan oleh Mahkamah Agung.	- Analisis Hukum - Analisis Perkara - Analisis Putusan - Analisis Pertimbangan Hukum
PL4	Legal Officer/Staf Legal	<i>Legal officer</i> adalah pekerjaan yang bertugas menangani masalah hukum, baik secara internal maupun eksternal serta untuk melindungi organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja guna menghindari masalah hukum. <i>Legal officer</i> disebut juga kuasa hukum di perusahaan yang tidak hanya mengurus masalah internal perusahaan, tetapi masalah eksternal perusahaan. Profesi ini dapat ditemukan di dalam perusahaan swasta, agensi, dan berbagai bidang pekerjaan lainnya untuk mengatur legalitas dan izin perusahaan. Tugas seorang <i>legal officer</i> bagi perusahaan dengan skala besar dapat dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya bertugas menangani dokumen, izin, atau kuasa hukum yang bertugas menangani masalah hukum perdata maupun pidana.	- Birokrasi Pemerintahan - Staf Legal Perusahaan

B. DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN BERBASIS OBE DALAM MENDUKUNG MBKM

Bidang Sikap dan Tata Nilai (*Attitude*)

S.O1/ CPL.1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, dan etika profesi yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.	<i>Fear God Almighty and internalize religious values, morality, humanity, and professional ethics that are inclusive, democratic, and fair.</i>
S.O2/ CPL.2	Berpihak dan peduli terhadap masyarakat <i>mustadl'afin</i> secara bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan keahliannya.	<i>Favors and cared for the community mustadl'afin responsibly in carrying out their duties and expertise.;</i>

Bidang Pengetahuan (*Knowledge*)

P.01/ CPL.3	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (<i>curiosity</i>) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara.	<i>Mastering various theories, principles, sources, and structures of positive law and Islamic law in the field of Constitutional law and having intellectual curiosity to solve problems in the field of constitutional law in order to realize civil society.</i>
P.02/ CPL.4	Menguasai dan memahami metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis dalam bidang hukum Tata Negara.	<i>Mastering and understanding the method of positive legal reasoning and the istinbath method of Islamic law critically, logically, creatively, innovatively and systematically in the field of Constitutional law.</i>

P.03/ CPL.5	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;	<i>Mastering the principles of law enforcement both litigated and non-litigation, and mastering the theory and concept of Constitutional law based on professional ethics.</i>
----------------	---	--

Bidang Keterampilan Umum (*General Skills*)

KU.01/ CPL.6	Memiliki keterampilan komunikasi lisan/tulisan dengan baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja tingkat nasional/internasional.	<i>Have good and correct oral/written communication skills in the development of the academic world and the world of work at the national/international level.</i>
KU.02/ CPL.7	Mampu mengaplikasikan bidang hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang hukum Tata Negara dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<i>Able to apply the field of positive law and Islamic law and utilize science, technology, and/or art in the field of Constitutional law in solving problems and able to adapt to the situation faced.</i>
KU.03/ CPL.8	Mampu mengaplikasikan hukum Tata Negara dengan berdasar nilai-nilai keilmuan integratif-multidisipliner	<i>Able to apply the study of constitutional law that is interdisciplinary.</i>

Bidang Keterampilan Khusus (*Specific Skills*)

KK.01/ CPL.9	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian masalah hukum Tata Negara secara litigasi dan non litigasi sebagai kompetensi utama lulusan.	<i>Able to implement procedural procedures in resolving Constitutional law problems through litigation and non-litigation as the main competence of graduates.</i>
KK.02/ CPL.10	Mampu menerapkan prinsip dan metode yang mendasari kajian hukum Tata Negara di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan.	<i>Able to apply the principles and methods underlying the study of Constitutional law in the field of government and constitution.</i>

KK.O2/ CPL.11	Mampu merumuskan dan menyusun dokumen hukum berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara sebagai legal drafter dan menerima serta mengkomunikasikan aspirasi masyarakat.	<i>Able to formulate and compile legal documents based on positive law and Islamic law in the field of Constitutional law as a legal drafter and accept and communicate the aspirations of the community.</i>
KK.O4/ CPL.12	Mampu menyelesaikan masalah hukum khususnya pada bidang tata negara, pemilu, dan administrasi negara.	<i>Able to solve legal problems, especially in the fields of state administration, elections, and state administration.</i>
KK.O5/ CPL.13	Mampu membaca, memahami, dan menghafal ayat-ayat alqur'an, hadis, dan kitab turots yang berkaitan dengan ketatanegaraan.	<i>Able to read, understand, and memorize verses of the Qur'an, hadith, and the book of turots related to constitution.</i>

Maksimal adalah 14 CPL. Tulisan berwarna merah adalah disesuaikan dengan masing-masing program studi dan kekhasannya.

A. Penetapan Bahan Kajian

Berdasarkan Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PT dan Keputusan Dirjen Pendis tentang SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTKI Tahun 2018.

Tabel 3
Penetapan Bahan Kajian

Kode	Kelompok Bahan Kajian	Materi Kajian
BK 1 (Kel. MK 1)	<i>Charakter Building</i> , Teori Dasar Dan Kemampuan Bahasa	1. Pendidikan Pancasila 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Etika Profesi Hukum 4. Islam dan Moderasi Beragama 5. Bahasa Indonesia 6. Bahasa Arab 7. Filsafat Umum 8. Ilmu Politik

		9. Ilmu Negara
BK 2 (Kel. MK 2)	Ilmu Hukum	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Tata Hukum DI Indonesia 3. Sosiologi dan Antropologi Hukum 4. Sistem Peradilan Di Indonesia 5. Hukum Adat 6. Hukum Perdata 7. Hukum Pidana
BK 3 (Kel. MK 3)	Ilmu Fikih/Hukum Islam & Ketatanegaraan Islam	1. Ushul Fikih 2. Kaidah Fikih 3. Fikih Jinayah 4. Tarikh Tasyri' 5. Fikih Munakahat 6. Fikih Muamalah 7. Studi Naskah Fikih Ketatanegaraan 8. Fikih Siyasah 9. Tafsir dan Hadis Ahkam Siyasah 10. Ilmu Falak 11. Filsafat Hukum Islam 12. Hukum Perdata Islam Di Indonesia 13. Pemikiran Politik Islam
BK 4 (Kel. MK 4)	Hukum Formil/Hukum Kepengacaraan	1. Hukum Acara MK 2. Hukum Acara TUN 3. Hukum Acara Pidana 4. Hukum Acara Perdata/PA
BK 5 (Kel. MK 5)	Hukum Ketatanegaraan	1. Perbandingan Hukum Tatanegara 2. Hukum Pemerintahan Daerah 3. Hukum Internasional 4. Hukum dan Teknologi 5. Hukum dan Kebijakan Publik 6. Hukum Pertanahan & Properti 7. Politik Hukum 8. Hukum Tata Negara 9. Hukum Administrasi Negara

		10. Hukum Internasional 11. Legal Drafting 12. Hukum Pemilu & Partai Politik 13. Hukum Konstitusi dan Perundang-undangan 14. Hukum Diplomasi dan Konsulat 15. Hukum Lingkungan 16. Hukum Tata Ruang 17. Legal Auditor dan Digitalisasi Pemerintahan 18. Hukum Perlindungan Data Pribadi 19. Advokasi dan Bantuan Hukum 20. Legal Opinion dan Manajemen Konflik 21. Hukum dan Hak Asasi Manusia 22. Pengelolaan Kantor Hukum dan Teknik Pelayanan dan Konsultasi 23. Hukum dan Teknik Penyusunan Instrumen Perkara
BK 6 (Kel. MK 6)	Ilmu Hadits dan Qur'an	1. Teologi Islam 2. Sejarah Peradaban Islam 3. Studi al-Qur'an 4. Studi al-Hadits 5. Matrikulasi Tahsin Qur'an 6. Matrikulasi Tahfid Qur'an
BK 7 (Kel. MK 7)	Teori dan Pendekatan Penelitian	1. Metodologi Penelitian 2. Metodologi Studi Islam 3. Metodologi Penelitian HTN 4. Studi Kitab Turas 5. Skripsi
BK 8 (Kel. MK 8)	Pengalaman Lapangan	1. Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan 2. Praktikum Lembaga Pemerintahan & Peradilan 3. KPM

Tulisan Merah : Hasil Kesepakatan Bersama APHUTARI

Tulisan Biru : Kekhususan Mata Kuliah Pilihan Prodi

Penentuan CPL terkait mata kuliah tidak hanya satu tetapi juga bisa 2 CPL bahkan 4 CPL.

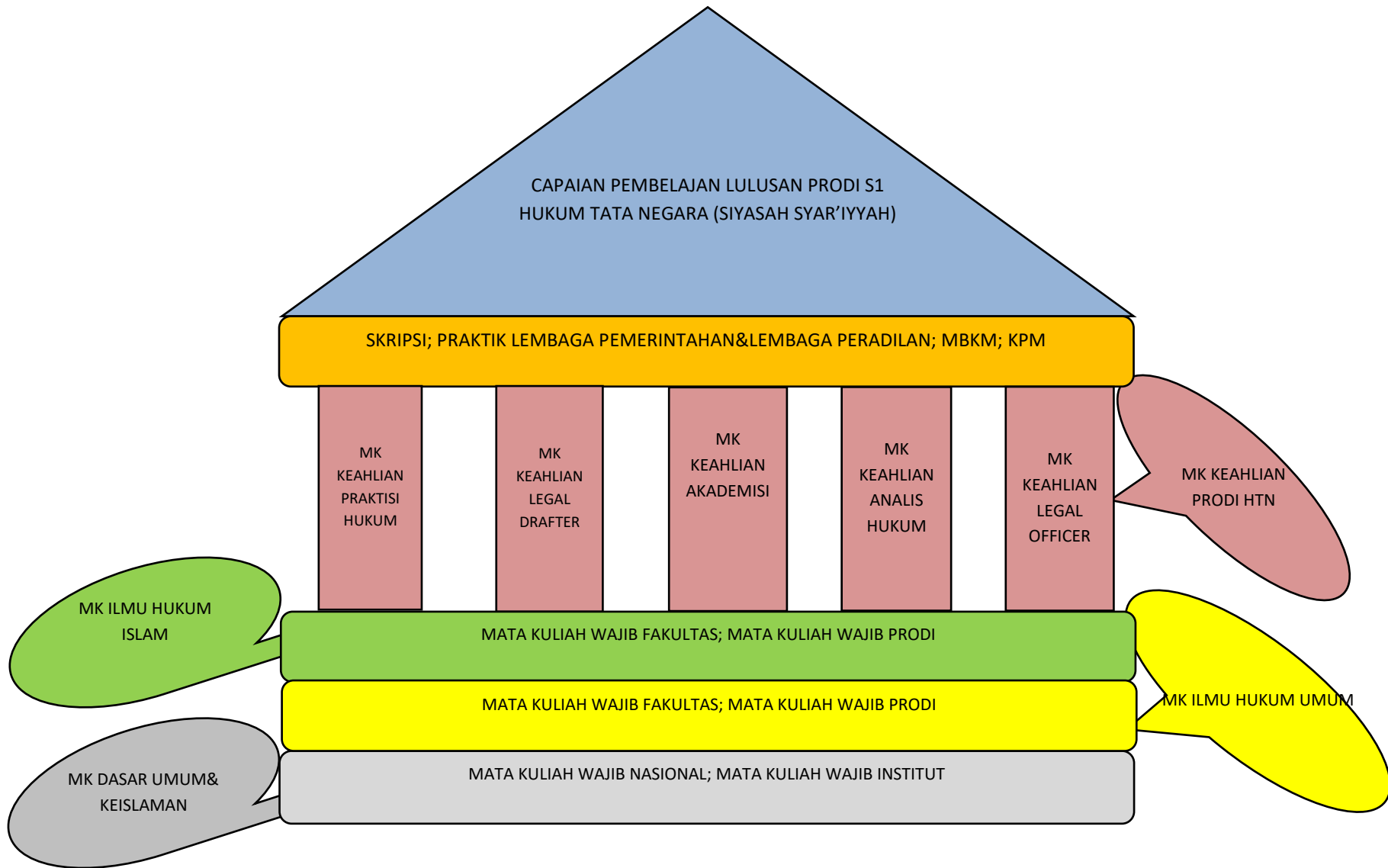
PETA/MATRIKS KURIKULUM BERDASARKAN KELOMPOK MATA KULIAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C. BODY OF KNOWLEDGE PRODI S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH) DI FAKULTAS SYARIAH BERBASIS OBE



DITETAPKAN DAN TELAH DISEPAKATI BERSAMA
PADA HARI SELASA, TANGGAL 9 JULI 2024
DI BENGKULU

UIN Antasari Banjarmasin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

UIN Sumatera Utara Medan

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

UIN Salatiga

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

IAIN PONOROGO

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

IAIN MADURA

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

IAIN Parepare

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

IAIN BONE

STAIN TENGKU DIRUNDENG MEULABOH

IAIN Palopo

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

IAIN Curup

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

IAIN Metro

IAIN Kediri

IAIN Fattahul Muluk Papua

IAIN Kerinci

UIN Imam Bonjol Padang

UIN Raden Intan Lampung

UIN Sunan Ampel Surabaya

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

IAIN Pontianak

IAIN Kendari

UIN Ar-Raniry Aceh

STAIN Bengkalis

UIN Raden Intan Lampung

Disahkan oleh,

Ketua Umum,



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum

Sekretaris Jenderal,



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H